

UNIVERSITAS INDONESIA

**SEJARAH PEMBENTUKAN GORONTALO
DARI KABUPATEN MENJADI PROPINSI
1953 – 2000**

TESIS

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora dalam
Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**

**DWIANA HERCAHYANI
NPM. 6704040047**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK 2008**

ABSTRAK

DWIANA HERCAHYANI, SEJARAH PEMBENTUKAN GORONTALO DARI KABUPATEN MENJADI PROPINSI 1953 – 2000 (di bawah bimbingan Prof. Dr. I Ketut Surajaya dan Dr. Djoko Marihandono), 101 + xii + 1 peta, Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pembentukan kabupaten Gorontalo hingga menjadi propinsi Gorontalo serta peran masyarakat Gorontalo dalam proses pembentukan propinsi Gorontalo. Tahun 1953 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah dan perundangan yang berlaku dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah. Wilayah Gorontalo pada tahun 1953 merupakan tempat kedudukan pemerintahan daerah Sulawesi Utara dan menjadi daerah otonom (Swapraja Gorontalo). Tahun 2000 menjadi batas akhir dengan pertimbangan propinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000.

Sistem otonomi daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks bentuk Negara di Indonesia dibagi atas daerah propinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota dan diatur dengan Undang-undang. Daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Adanya sistim otonomi daerah, implementasinya adalah muncul daerah-daerah baru hasil pemekaran daerah. Pada kasus sulawesi Utara terjadi pemekaran wilayah yaitu menjadi propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Pembentukan propinsi Gorontalo merupakan perjalanan sejarah yang panjang, sejak Gorontalo berbentuk kabupaten berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Berdasarkan tinjauan historis, Gorontalo merupakan daerah yang pernah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942 oleh Nani Wartabone, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, secara geografis, luas wilayah Gorontalo ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan) serta perdagangan dan transportasi sangat mendukung untuk terbentuknya propinsi Gorontalo. Tanggal 22 Desember 2000, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo, maka resmi Gorontalo menjadi propinsi terpisah dari propinsi induknya yaitu propinsi Sulawesi Utara.

ABSTRACT

DWIANA HERCAHYANI. **THE HISTORY OF INSTALATION OF GORONTALO REGENCY INTO A PROVINCE 1953 – 2000**, 101 + XIII.

The research aims to explain about the public regulations from the installation of the Gorontalo regency to the setting up of Gorontalo Province, and roles that local people played. The year 1953 is a first in temporal scope because in that year, the first public regulation was made on the local government. Gorontalo territory in that year was one of important towns in North Sulawesi Province and had an autonomy (self-rule Gorontalo). The year 2000 is a last in temporal scope because in the year Gorontalo Province was installed on the ground of UU 2000 no. 38.

Local autonomy in governmental system in Indonesia is divided into governmental level of province, and then sub-divided into more regencies and cities. All of this was hold in national regulation. As a result of local autonomy, many special areas elevated. In North Sulawesi, some new areas were formed namely Province of North Sulawesi and Province of Gorontalo. The forming of Gorontalo Province has a long historical background. It began from Gorontalo Regency that installed by UU 1959 no. 29, on local government of regency in Sulawesi. From historical background, Gorontalo was a territory that proclaimed her independence on January 23th, 1942 by Nani Warotabone, before Indonesian independence on August 17th, 1945. Geographically, Gorontalo has a natural potentials resources (forest, cultivation, farming, fishery, and mining) beside her transportation and trading. The potentials support to the elevation of Gorontalo Province. In December 22nd, 2000, Gorontalo was given a status of province formally, based on UU 2000 no. 38.

Keywords : Gorontalo, province, autonomy

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diujikan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008, pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

1. Dr. Priyanto Wibowo
Ketua Tim Penguji
2. Prof. Dr. I Ketut Surajaya
Pembimbing
3. Dr. Djoko Marihandono
Pembaca/Penguji
4. Dr. Magdalia Alfian
Penguji
5. Dr. Suharto
Penguji

Disahkan oleh :

Ketua Departemen Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Priyanto Wibowo
NIP. 131689560

Prof. Dr. Ida Sundari Husen

LEMBAR PERNYATAAN

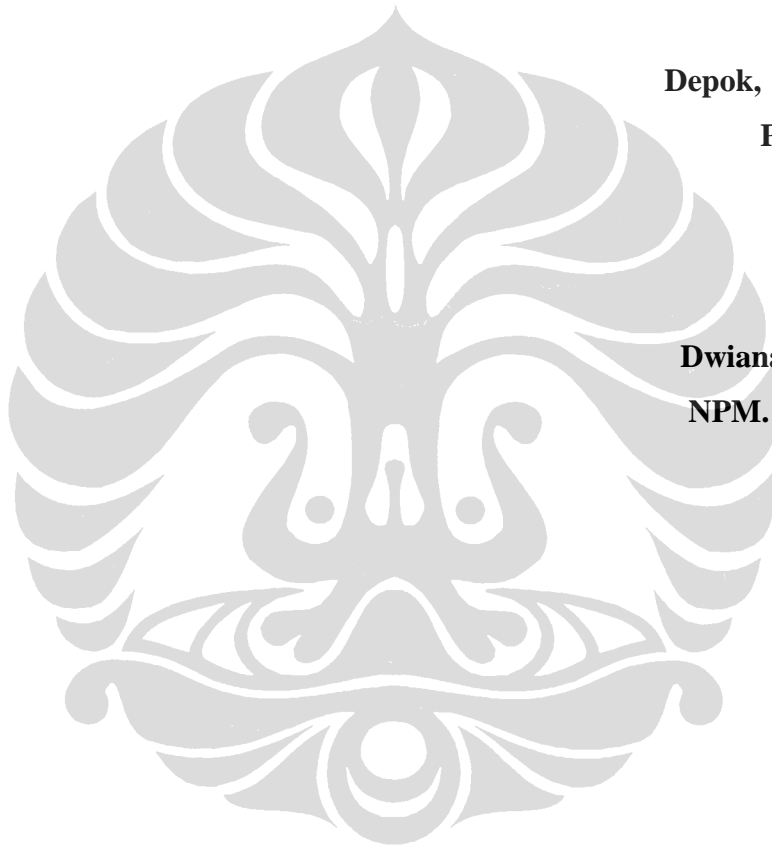
Seluruh isi tesis in sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Depok, Januari 2008

Penulis

Dwiana Hercahyani

NPM. 6704040047



ABSTRAK

DWIANA HERCAHYANI, **SEJARAH PEMBENTUKAN GORONTALO DARI KABUPATEN MENJADI PROPINSI 1953 – 2000** (di bawah bimbingan Prof. Dr. I Ketut Surajaya dan Dr. Djoko Marihandono), 101 + xii + 1 peta, Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pembentukan kabupaten Gorontalo hingga menjadi propinsi Gorontalo serta peran masyarakat Gorontalo dalam proses pembentukan propinsi Gorontalo. Tahun 1953 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah dan perundangan yang berlaku dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah. Wilayah Gorontalo pada tahun 1953 merupakan tempat kedudukan pemerintahan daerah Sulawesi Utara dan menjadi daerah otonom (Swapraja Gorontalo). Tahun 2000 menjadi batas akhir dengan pertimbangan propinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000.

Sistem otonomi daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks bentuk Negara di Indonesia dibagi atas daerah propinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota dan diatur dengan Undang-undang. Daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Adanya sistem otonomi daerah, implementasinya adalah muncul daerah-daerah baru hasil pemekaran daerah. Pada kasus Sulawesi Utara terjadi pemekaran wilayah yaitu menjadi propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Pembentukan propinsi Gorontalo merupakan perjalanan sejarah yang panjang, sejak Gorontalo berbentuk kabupaten berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Berdasarkan tinjauan historis, Gorontalo merupakan daerah yang pernah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942 oleh Nani Wartabone, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, secara geografis, luas wilayah Gorontalo ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan) serta perdagangan dan transportasi sangat mendukung untuk terbentuknya propinsi Gorontalo. Tanggal 22 Desember 2000, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo, maka resmi Gorontalo menjadi propinsi terpisah dari propinsi induknya yaitu propinsi Sulawesi Utara.

RESUME

Tesis yang berjudul SEJARAH KABUPATEN GORONTALO 1953 – 2000 ini terdiri dari 5 Bab yaitu Bab I berisi tentang Pendahuluan berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode dan sumber dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang Gorontalo tahun 1953 – 1998 terdiri atas pembagian wilayah di Sulawesi sebagai daerah otonom dan pembentukan Kotamadya Gorontalo. Pada bab III adalah tentang otonomi daerah dan pengaruhnya di Gorontalo 1998 – 2000, berisi tentang sejarah Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2000 yaitu dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Penerapan UU nomor 22 tahun 1999 di Gorontalo hingga rencana pembentukan propinsi Gorontalo. Reaksi masyarakat Gorontalo tentang rencana pembentukan propinsi Gorontalo Tomini Raya. Pada Bab IV adalah propinsi Gorontalo tahun 2000. Pada bab ini dibahas tentang lahirnya propinsi dan pembagian administrasi wilayah Gorontalo, system pemerintahan yang meliputi eksekutif (Gubernur dan Birokrasi) dan Legislatif (DPRD) serta institusi-institusi daerah, serta partisipasi masyarakat Gorontalo dalam pemeritahan propinsi. Dan pada Bab V adalah kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah peraturan pemerintah apa saja yang berhubungan dengan pembentukan kabupaten Gorontalo dan propinsi Gorontalo . Kedua, Apa peran masyarakat Gorontalo dalam proses pembentukan propinsi Gorontalo dan motivasi apa yang melatarbelakanginya dan bagaimana hubungan pusat dan daerah dalam sistim administrasi pemerintahan propinsi Gorontalo dan dampaknya pada masyarakat Gorontalo. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pembentukan kabupaten Gorontalo hingga perubahan statusnya menjadi propinsi Gorontalo. Yang kedua adalah menjelaskan peran masyarakat Gorontalo dalam proses pebentukan propinsi Gorontalo dan motivasi yang melatarbelakanginya.

Serta menjelaskan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistim administrasi pemerintahan propinsi Gorontalo dan dampaknya pada masyarakat Gorontalo.

Ruang lingkup penulisan tesis ini adalah masalah penetapan awal tahun Tahun 1953 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah dan perundangan yang berlaku dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah. Wilayah Gorontalo pada tahun 1953 merupakan tempat kedudukan pemerintahan daerah Sulawesi Utara dan menjadi daerah otonom (Swapraja Gorontalo). Tahun 2000 menjadi batas akhir dengan pertimbangan propinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000. Tentang wilayah Gorontalo sebagai lokus penulisan adalah Gorontalo merupakan daerah transisi antara budaya bugis di selatan dan pengaruh minahasa di utara, secara agama adalah Islam di selatan dan Kristen di utara, namun wilayah Gorontalo adalah mayoritas penduduknya 95 % (berdasarkan data BPS tahun 1999) adalah beragama Islam. Secara historis, Wilayah Gorontalo pernah pernah memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 23 Januari 1942 oleh Nani Wartabone. Persitiwa ini dijadikan semangat bagi masyarakat Gorontalo dalam pembentukan propinsi Gorontalo, dan hal yang sama juga dilakukan ketika pendeklarasian pembentukan propinsi Gorontalo oleh Nelson Pomalingo pada tanggal 23 Januari 2000 di lapangan Talaga, Gorontalo. Pada penulisan tesis ini hanya dibatasi pada wilayah Daerah Tingkat II Gorontalo (kabupaten Gorontalo) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1953 dan wilayah administrasi Daerah Tingkat I Gorontalo (propinsi Gorontalo) berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000.

Metode dan sumber yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan studi kepustakaan, dokumentasi, arsip dan wawancara. Wawancara dilakukan karena penulisan ini merupakan sejarah kontemporer dan para pelakunya masih dapat ditemui dan dapat dilakukan wawancara untuk menggali dan menganalisis kesaksian dari para pelaku maupun informan. Selain itu digunakan sumber dari surat kabar dan majalah yang terbit di Manado dan Gorontalo maupun surat kabar nasional seperti Media Indonesia, Kompas, Republika dan Rakyat Merdeka. Unuk dokumen digunakan peraturan pemeuntah, undang-undang dan lembaran Negara yang didapatkan di Perpustakaan Nasional dan Depdagri.

Setidaknya sudah enam kali peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah :

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1945 mengenai Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang mempunyai tugas membantu menjalankan pemerintahan di daerah. NKRI terdiri atas daerah-daerah propinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota. KNID bersama dengan Kepala Daerah mengatur rumah tangga daerahnya. KNID sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang kepala daerah.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1948, wilayah Indonesia dibagi dalam propinsi, kabupaten dan kota dan Daerah tingkat III yaitu desa.
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957, pada saat itu Pemilu I baru saja berlangsung dan partai-partai politik yang ada di parlemen menginginkan adanya pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Kepala Daerah.
4. Undang-undang nomor 18 tahun 1965. Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sistim pemerintahan yang dijalankan adalah desentralisasi territorial yaitu berhak mengatur dan emngurus rumah tangganya sendiri (menjadi daerah otonom) dan tersusun dalam tiga tingkatan yaitu propinsi atau kota raya (Daerah Tingkat I), Kabupaten/kotamadya sebagai Daerah Tingkat II, Kecamatan dan atau kotapraja sebagai daerah tingkat III.
5. Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam UU ini merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengna pembatasan terhadap kelaluasaan otonomi seperti tentang nama, batas, ibukota dan modal pendapatan daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Juga ditetapkan penghapusan daerah.
6. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa sendiri . Otonomi daerah adalah wewenang daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten dan kota, untuk propinsi adalah otonomi daerah.

Untuk pembentukan propinsi Gorontalo kronologis – dengan dukungan-dukungan dari berbagai unsur.

Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, karena berkat dan kehendakNya akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Berbagai permasalahan dalam pengerjaan tesis ini penulis hadapi, diantaranya mulai dari kondisi kesehatan yang sering sakit, pada akhirnya dapat terselesaikan juga penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya penulis haturkan kepada banyak pihak yang membantu dalam pengerjaan tesis ini sehingga bisa diujikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Priyanto Wibowo sebagai Ketua Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang baru dan Prof. Dr. I Ketut Surajaya sebagai Ketua Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang lama, yang telah memberi kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, hingga mengakhiri masa studinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, selaku pembimbing di sela-sela kesibukannya meluangkan waktunya membimbing dan mengoreksi tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Djoko Marihandono selaku Pembaca tesis. Beliau yang penulis sapa dengan sebutan Mas Djoko tidak pernah kenal lelah dan tidak bosan-bosannya untuk membantu dan

membimbing penulis dengan tulus, baik segi teknis penulisan maupun substansi penulisan tesis ini. Beliau merupakan kakak dan guru yang sangat sabar bagi penulis dalam diskusi dan memeriksa kesalahan-kesalahan yang penulis lakukan bahkan hingga larut malam membimbing dan menemani penulis mengerjakan tesis di jurusan Perancis hingga terselesaikannya tesis ini.

Kepada Dra. Triwahyuning M. Irsyam, M.Si, biasa penulis sapa Mbak Titik, Sekretaris Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI, penulis ucapkan banyak terima kasih atas arahan dan nasehatnya, khususnya masalah administrasi perkuliahan dan mata kuliah, hingga akhirnya penulis memperoleh kesempatan menyusun dan mengujikan tesisnya. Mbak Titik tidak pernah bosan-bosannya memberikan semangat dan bimbingan pada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Suharto dan Dr. Magdalia Alfian, yang berkenan meluangkan waktunya membaca dan menguji tesis ini, sehingga penulis bisa dinyatakan lulus meraih gelar Magister. Koreksi dan kritik akan penulis perhatikan untuk perbaikan tesis ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada almarhum Ayahanda penulis Bapak Soetrisno dan Prof. Dr. Susanto Zuhdi yang telah mendorong penulis untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia.

Kepada Harto Juwono, M.Hum penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena beliau banyak membantu penulis dalam menerjemahkan data-data tentang Gorontalo dan memberikan masukan-masukan untuk penulisan tesis ini, khususnya tentang Gorontalo.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seangkatan tahun 2004, khususnya pada Dewi dan Fera, teman seperjuangan dalam penulisan tesis, dengan saling memberikan semangat dan dukungan yang tidak henti-hentinya bersama-sama menyelesaikan penulisan tesis ini hingga larut malam di jurusan Perancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada staf Perpustakaan FIB atas bantuannya dengan penuh kesabaran memberikan pelayanan mencari buku-buku yang diperlukan untuk penulisan tesis ini.

Kepada Ibunda tercinta yaitu Ibu Surtiyati penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga, Ibu yang sangat mendukung dan tidak pernah bosan-bosannya menunggui penulis dalam pengerjaan penulisan tesis bahkan hingga ikut *begadang* bersama penulis menyelesaikan tesis. Juga terima kasih penulis sampaikan kepada kakak penulis, Ir. Irbar Herupurwanto beserta keluarga khususnya Fakhri dan Raihan dengan “musik” kecerewetannya menjadikan hiburan bagi penulis saat sedang jenuh, dan adik-adik yaitu Triana Listiyaningsih dan Dini Novia Heruwati beserta keluarga yang memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Atasan langsung penulis, Bapak Drs. M. Alimuddin, yang telah mengizinkan dan memberikan kelonggaran waktu serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga pengerjaan tesis ini dan diujikan.

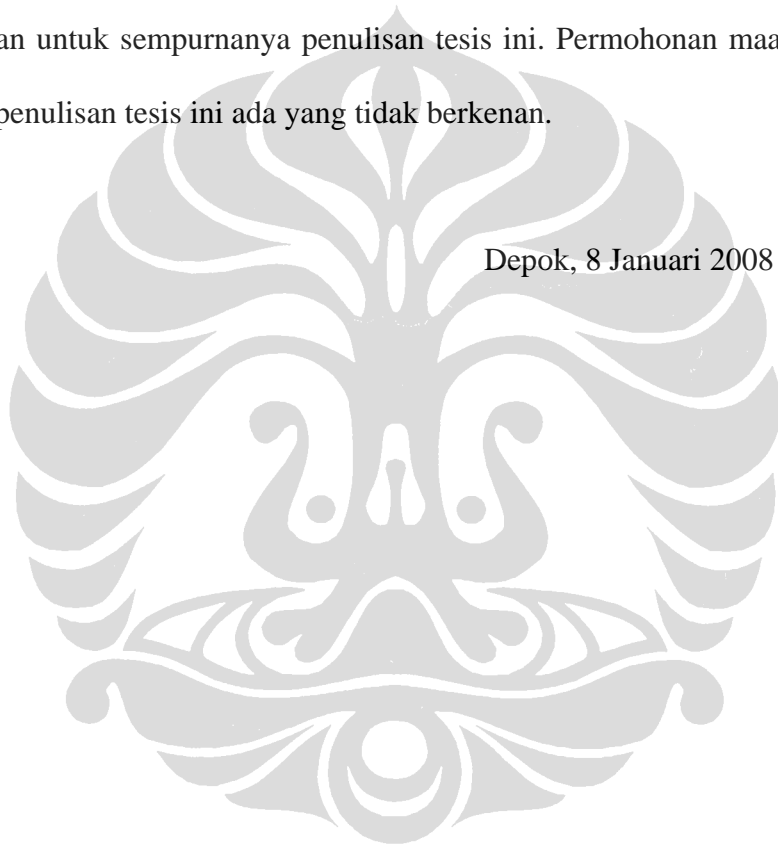
Kepada Bapak Ir .Isman Uge, M.Si penulis haturkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama penulis berada di Gorontalo dalam rangka penelitian hingga

penyelesaian tesis ini dengan mengirimkan bahan-bahan tentang Gorontalo untuk penulisan tesis ini.

Terakhir ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Rustam Tilome yang telah membantu dengan mengizinkan penulis memfotokopi bahan-bahan khususnya surat kabar yang memuat berita tentang Gorontalo.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk sempurnanya penulisan tesis ini. Permohonan maaf kami haturkan jika dalam penulisan tesis ini ada yang tidak berkenan.

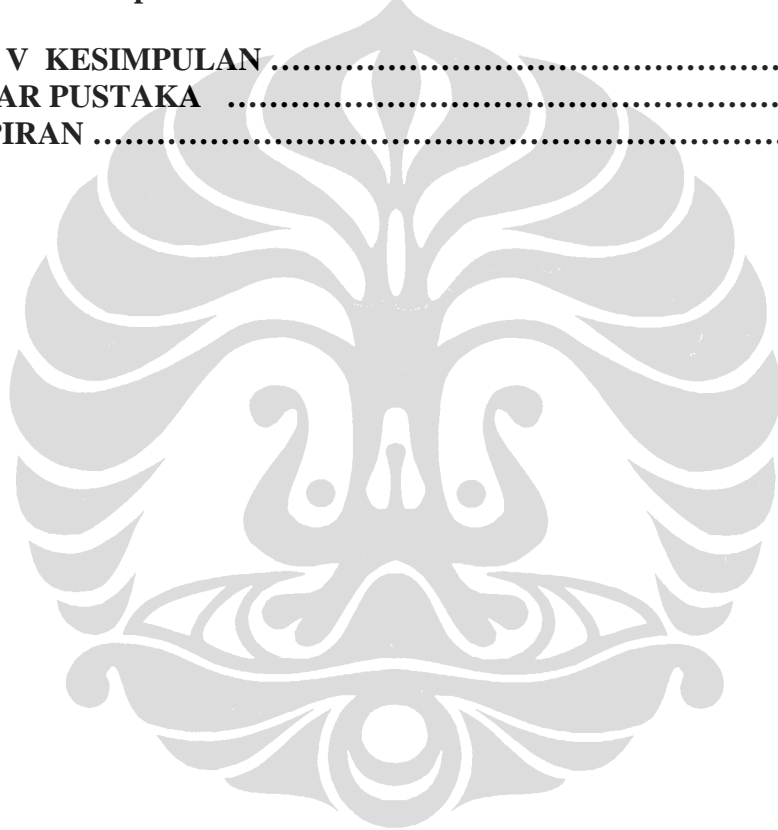
Depok, 8 Januari 2008



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SKEMA	xiii
B A B I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan	9
1.4 Ruang Lingkup	9
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.6 Metode dan Sumber	12
1.7 Sistematika Penulisan	16
B A B II GORONTALO TAHUN 1953 – 1998	17
2.1 Pembagian Wilayah Propinsi Sulawesi	20
2.2 Kabupaten Gorontalo	22
2.3 Peraturan Pemerintah Tahun 1953 dan Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi	26
2.4 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 dan Pembentukan Propinsi Sulawesi Utara – Tengah	30
2.5 Kotamadya Gorontalo dalam Lingkup Propinsi Sulawesi Utara	33
2.6 Simpulan	35
B A B III OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA DI GORONTALO 1998 – 2000	39
3.1 Sejarah Undang-undang Otonomi Daerah Sampai Dengan Tahun 2000	42
3.2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Penerapannya di Gorontalo	44
3.3 Rencana Pembentukan Propinsi Gorontalo	50
3.4 Reaksi Masyarakat Gorontalo tentang Rencana Pembentukan Propinsi Gorontalo Tomini Raya.....	57
3.5 Simpulan	60

B A B IV PROPINSI GORONTALO TAHUN 2000	62
4.1 Lahirnya Propinsi dan Pembagian Administrasi	63
4.2 Sistem Pemerintahan	81
4.2.1 Eksekutif (Gubernur dan Birokrasi) dan Legislatif (DPRD)	84
4.2.2 Institusi-institusi Daerah	89
4.3 Partisipasi Masyarakat Gorontalo Dalam Pemerintahan Propinsi	90
B A B V KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jarak dari Kabupaten Menuju Ibukota Propinsi	55
Tabel 2	Organisasi Perangkat Pemerintahan Daerah Propinsi Gorontalo	57
Tabel 3	Perekonomian kabupaten/kota di wilayah Gorontalo Tahun 1995 dan 1999	67
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Gorontalo Tahun 1995 dan 1999	68
Tabel 5	Pendapatan Per kapita kabupaten/kota Gorontalo Tahun 1995 dan 1999	69
Tabel 6	Demografi Penduduk di Wilayah Gorontalo Tahun 1999	74



DAFTAR SKEMA

Skema 1	Propinsi Sulawesi Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945	22
Skema 2	Daerah-daerah Propinsi Republik Indonesia Serikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950	25
Skema 3	Propinsi Sulawsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950	26
Skema 4	Struktur Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957	29
Skema 5	Daerah Tingkat I dalam Propinsi Sulawesi Berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960	33
Skema 6	Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964	35
Skema 7	Gorontalo Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974	41
Skema 8	Daerah berdasarkan Hukum Adat pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda	44
Skema 9	Propinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999	47
Skema 10	Pemekaran Kabupaten di Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999	49
Skema 11	Jabatan Struktural Pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara Berdasarkan <i>Bohusami</i> era Tahun 1980-an	50
Skema 12	Struktur Kepala Daerah di Propinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999	52
Skema 13	Institusi Perjuangan Pembentukan Propinsi Gorontalo	71
Skema 14	Bagan Dukungan Pembentukan Propinsi Gorontalo	77
Skema 15	Perjalanan Pembentukan Propinsi Gorontalo	78

Skema 16 Kelembagaan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974	83
Skema 17 Kelembagaan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999	84
Skema 18 Bagan Struktur Administrasi Pemerintahan Propinsi Gorontalo	86
Skema 19 Struktur Administrasi Pemerintahan Propinsi Gorontalo Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000	88
Skema 20 Institusi Daerah di Gorontalo Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999	91

